

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN DAN  
PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas –Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**MELDA SEPTERA**

**NPM : 1651010465**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**



**EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN DAN  
PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas –Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh :

**MELDA SEPTERA**

**NPM : 1651010465**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : A.Zuliansyah, S.Si.M.M**

**Pembimbing II : Fatih Fuadi, M.S.**

**EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Kemiskinan di Provinsi Lampung dari tahun 2009-2018 cenderung mengalami penurunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung secara parsial dan secara simultan dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung secara parsial dan secara simultan dan mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang kemiskinan di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Jumlah sampel yang digunakan adalah 10 tahun yakni tahun 2009-2018, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data yang telah didapat kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Secara parsial, variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sedangkan variabel pendidikan dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2009-2018. Perspektif Islam mengenai kemiskinan di Provinsi Lampung, dalam kegiatan berekonomi kurangnya pemerintah menjalankan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Pemerintah hanya berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Pada zaman Rasulullah orang-orang miskin memperoleh bantuan materi dari kas Negara yang ditangani secara professional dan Al-Quran juga menyerukan agar orang-orang kaya membantu orang miskin karena dalam harta kekayaan orang kaya ada hak orang miskin.

**Kata kunci: Jumlah Penduduk, Pendidikan, Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melda Septera

NPM : 1651010465

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2018”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2020  
Penulis,

**MELDA SEPTERA**  
**NPM. 1651010465**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN  
DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT  
KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2018**

**Nama : Melda Septera  
NPM : 1651010465  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**A. Zulfansyah, S.Si., M.M  
NIP.198302222009121003**

**Fatih Fuadi, M.Si  
NIP.198512192015031006**

**Ketua Jurusan,**

**Madnasir, S.E., M.S.  
NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN  
DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI  
PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN  
2009-2018”** disusun oleh: **Melda Septera, NPM: 1651010465**. Program studi:  
**Ekonomi Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: **Senin, 15 Desember 2020**.

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua Sidang : Dr. H. Nasrudin, M.Ag**

(.....)

**Sekretaris : Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si**

(.....)

**Penguji I : Nurlaili, M.A**

(.....)

**Penguji II : A. Zuliansyah, S.Si., M.M**

(.....)

**Mengetahui**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Dr. Husein Abdul Ghofur, M.Si**  
NPM. 198008012003121001



## MOTTO

فَاعْتَبِرْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ  
اللَّهِ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

*Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.*

**(Q.S Ar-Rum: 38)**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta Ayahanda Alamsyah dan Ibunda Jumiati serta Ibunda kandungku Ani Marlina (alm) yang di Surga, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan motivasi dan sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaannya yang telah diamanatkan kepadaku serta atas kesabarannya yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, mendidik memberikan dukungan dengan do'a yang tiada henti, arahan, bimbingan, serta nasehat, moral, material dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang serta tak henti-hentinya mendoakan selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Senyum dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidupku.
2. Seluruh keluarga besarku, terutama adik-adikku tercinta Anisa Bella, Eko Iswahyudi, Muhammad Febri Yansyah yang menjadi alasan kuatku untuk menyelesaikan studi ini.
3. Teman-teman yang selalu mendampingi dan memberikan semangat dalam setiap proses pembuatan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik, khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Melda Septera, dilahirkan di Banjit pada tanggal 30 September 1998, anak Pertama dari empat bersaudara yang merupakan buah kasih dari pasangan Ayahanda Alamsyah dan Ibunda Ani Marlana (alm).

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. SD Negeri 2 Ulu Semong, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2010
2. SMP Negeri 1 Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang diselesaikan pada tahun 2013
3. SMA YADIKA Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016.
4. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah

Bandar Lampung, Oktober 2020

Penulis

**MELDA SEPTERA**  
**NPM: 1651010465**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam bidang ilmu syariah. Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E.,M.S.I. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak A.Zuliansyah, S.Si.,M.M Selaku Pembimbing I dan Bapak Fatih Fuadi, M.S. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pelajaran kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepada seluruh staf Akademik dan pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan pelayanan baik dalam mendapatkan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Kepada Kiki Mirwansyah S.E terimakasih telah meluangkan tenaga, waktu serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi yang sederhana ini hingga selesai.
7. Kepada sahabatku Cindy Azizah S.E, Delivia Safitri S.E, Dian Mega Sari S.E, Kenanga Tri Putri S.E, Ochi Oktavia S.E, Selviyana S.E, Geska Fentika S.E, Nur Hidayadtullah S.E, M.Deswan Siverly S.E, M.Rivad Rivaldy S.E, Muhammad Retno S.E yang telah meluangkan tenaga dan memberikan motivasi serta semangat guna menyelesaikan karya tulis ini.
8. Teman-teman angkatan 2016 prodi Ekonomi Syariah dan untuk teman-teman kelas F yang tak dapat kusebut satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
9. Teman-teman KKN kelompok 184 desa Ngarip Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus yang tak dapat kusebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya kepada pembaca dapat memberikan masukan dan saran

guna melengkapi tulisan ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan penyempurnaan penelitian selanjutnya khususnya ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, Oktober 2020

Penulis

**Melda Septera**  
**NPM.1651010465**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Identifikasi Masalah .....	15
E. Rumusan Masalah .....	16
F. Tujuan .....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kemiskinan	
1. Pengertian Kemiskinan .....	19
2. Klasifikasi Kemiskinan .....	22
3. Garis Kemiskinan.....	24
4. Teori Yang Berhubungan Dengan Kemiskinan .....	24

5. Aspek-aspek Kemiskinan.....	29
6. Karakteristik-karakteristik Kemiskinan .....	29
7. Factor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	30
8. Factor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan .....	33
9. Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	35
B. Jumlah Penduduk	
1. Pengertian Jumlah Penduduk .....	36
2. Indikator Jumlah Penduduk.....	38
3. Masalah Penduduk .....	38
4. Jumlah Penduduk Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	39
C. Pendidikan	
1. Pengertian Pendidikan.....	41
2. Indikator Pendidikan .....	46
3. Pendidikan Menurut Pandangan Islam.....	47
D. Pengangguran	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Pengangguran.....	49
2. Teori-teori Pengangguran.....	52
3. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	53
4. Jenis-jenis Pengangguran .....	56
5. Sebab-sebab Pengangguran.....	61
6. Dampak Negatif Pengangguran .....	62
7. Solusi Mengatasi Pengangguran .....	64
E. Penelitian Terdahulu .....	66
F. Kerangka Pemikiran.....	71
G. Hipotesis.....	72

### **BAB III Metode Penelitian**

A. Jenis Penelitian.....	76
B. Data dan Sumber Data .....	76
C. Populasi dan Sempel .....	77
D. Variabel Penelitian .....	77
E. Devinisi Operasional Variabel .....	78
F. Metode Analisis Data.....	79

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	86
2. Sejarah Singkat Provinsi Lampung.....	87



3. Geografi Provinsi Lampung .....	88
4. Sektor Ekonomi Provinsi Lampung .....	90
<b>B. Analisis Data</b>	
1. Uji Asumsi Klasik .....	90
2. Analisis Regresi Linier Berganda .....	95
3. Hasil Uji Hipotesis .....	97
4. Uji Koefisien Determinasi.....	99
<b>C. Pembahasan</b>	
1. Pengaruh Secara Parsial Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung .....	100
2. Pengaruh Silmultan Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung .....	101
3. Pengaruh Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	103
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	113
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018 .....	7
Tabel 1.2 Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera .....	9
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2009-2018 .....	10
Tabel 1.4 Pendidikan Menurut Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung .....	12
Tabel 1.5 Jumlah Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung .....	13
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	69
Tabel 3.1 Definisi Oprasional .....	79
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	91
Tabel 4.2 One Sample Kolmogorov .....	92
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonearitas .....	93
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi .....	94
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedasitas .....	95
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	96
Tabel 4.7 Hasil Uji t .....	97
Tabel 4.8 Hasil Uji F .....	99
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	71
---------------------------------	----





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Skripsi ini berjudul **“PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2018”** untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa arti atau istilah, antara lain :

1. Pengaruh adalah suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara suatu variabel dengan variabel lain.<sup>1</sup> Dengan kata lain kedua variabel atau lebih akan saling berhubungan dan akan menghasilkan suatu hal yang baru.
2. Jumlah Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dari pada waktu sebelumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sugiono, *Penelitian Administrative*, (Bandung : Alfabate, 2001), h.4

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2018

3. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.<sup>3</sup>
4. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran.<sup>4</sup>
5. Kemiskinan adalah salah satu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>5</sup>
6. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsi-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan *Sunnah*.<sup>6</sup> Ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami.

---

<sup>3</sup>M.Djumransjah, *Filsafat Pendidikan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004). h.22

<sup>4</sup>Sudono Sukino, *Makro Ekonomi Moderen*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2000). h.35

<sup>5</sup>Suerjono suekarto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006). h.320

<sup>6</sup>Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014). h.19

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui suatu kajian tentang kondisi pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran dan tingkat kemiskinan diprovinsi Lampung ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2014-2018.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapula alasan memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang seharusnya dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya Provinsi Lampung masih terdapat dalam tingkat kemiskinan yang tinggi Sumatera. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian di setiap Negara. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Kemiskinan di Provinsi Lampung dari 34 provinsi di Indonesia, Lampung menempati urutan ke-10 penduduk miskin terbanyak. Tingkat kemiskinan tertinggi masih berada di Provinsi Papua 27,74 persen, Papua Barat 23,01 persen dan Nusa Tenggara Timur 21,35 persen. Pada tahun 2018 kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi 13,14 persen.

Meskipun mengalami penurunan tetapi Provinsi Lampung masih menduduki peringkat ketiga tertinggi se-Sumatera. Dapat dilihat dari

kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini, Provinsi Lampung termasuk salah satu Provinsi yang mempunyai jumlah penduduk miskin kurang baik, yang dibuktikan dengan persentase kemiskinan setiap tahunnya terjadi kenaikan dan penurunan. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan pengangguran.

## 2. Alasan Subjektif

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini karen didukung oleh tersediannya data-data dan berbagai lietatur yang dibutuhkan dalam penulis sebagai referensi. Selain itu judul peneliti sesuai dengan jurusan penulis yakni pada Prodi: Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Untuk negara Indonesia salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan.<sup>7</sup>

Kemiskinan merupakan persoalan rumit yang sedang dihadapi oleh seluruh Negara-Negara di Dunia, Khususnya Negara-Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia sangat sulit

---

<sup>7</sup> Agussalim, Siti Walida Mustamin, Sri Undai Nurbayani, "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan", (Jurnal Analisis, Vol. 4 No. 2, Desember, 2015), H.166.



dilepaskan, bahkan semakin membelit dan menghambat Indonesia menjadi Negara maju. Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting, tidak hanya karena kecondongannya yang semakin meningkat, namun dampaknya yang muncul tidak sekedar dalam lingkup ekonomi semata tetapi juga masalah sosial dan kestabilan politik dalam negeri.

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup> Pemerintah mengalami kesulitan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, pemberantasan persoalan kemiskinan wajib menjadi keutamaan dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kemiskinan dapat diuraikan dari penyebabnya, terdiri dari dua macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu unsur dari budaya yang terdapat di suatu daerah tertentu berdasarkan faktor adat yang dimiliki di daerah tersebut, sehingga sedikitnya bisa dikurangi dengan menghindari faktor adat yang mempengaruhinya untuk bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu keadaan masyarakat yang tidak layak terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada

---

<sup>8</sup>Erutan Agus Panu Anton, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmi Politik, Vol. 10 No. 3 Maret 2007

<sup>9</sup>Pandu Baniadi & Mustofa, *Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan.

pada keadaan yang lemah untuk mengakses dan mengembangkan diri mereka sendiri dari cengkraman kemiskinan.

Di samping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, Tingkat Jumlah Penduduk, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor dan lintas pelaku secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.<sup>10</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara di belahan dunia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Sebagai negara berkembang tentu bukan hal yang aneh jika di negara tersebut masih memiliki warga masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan atau dibawah garis kemiskinan. Karena pada kenyataannya negara yang dianggap maju sekalipun memiliki penduduk miskin di wilayahnya.<sup>11</sup>

Berikut ini merupakan persentase penduduk miskin menurut provinsi di Indonesia tahun 2018.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Fridayana Yudiaatmaja, I Made Parwata, I Wayan Swendra, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat kemiskinan" e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Vol 4 Tahun 2016).

<sup>11</sup> Tannia Octasari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2009-2013", Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol 5, No 6, Tahun 2016, h. 495.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, *Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2018*

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018**

No.	Provinsi	Persentase (%)
1.	Papua	27,74
2.	Papua Barat	23,01
3.	Nusa Tenggara Timur	21,35
4.	Maluku	18,12
5.	Gorontalo	16,81
6.	Aceh	15,97
7.	Bengkulu	15,43
8.	Nusa Tenggara Barat	14,75
9.	Sulawesi Tengah	14,01
10.	Lampung	13,14
11.	Sumatera Selatan	12,80
12.	DI Yogyakarta	12,13
13.	Jawa Tengah	11,32
14.	Sulawesi Tenggara	11,63
15.	Jawa Timur	10,98
16.	Sulawesi Barat	11,25
17.	DKI Jakarta	3,57
18.	Sumatera Utara	9,22
19.	Sulawesi Selatan	9,06
20.	Jawa Barat	7,45
21.	Jambi	7,92
22.	Sulawesi Utara	7,80
23.	Kalimantan Barat	7,77
24.	Riau	7,39
25.	Kalimantan Utara	7,09
26.	Sumatera Barat	6,65
27.	Maluku Utara	6,64
28.	Kalimantan Timur	6,03
29.	Kep. Riau	6,20
30.	Banten	5,24
31.	Kalimantan Tengah	5,17
32.	Kep. Bangka Belitung	5,25
33.	Kalimantan Selatan	4,54
34.	Bali	4,01
35.	Indonesia	9,82

*Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2018*

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS diatas, Provinsi Lampung menempati urutan ke-10 penduduk miskin terbanyak, terlihat bahwa persentase penduduk miskin paling tertinggi adalah Provinsi Papua dengan persentase 27,74 persen, Papua Barat 23,01 dan Nusa Tenggara Timur 21,35 persen sedangkan tingkat kemiskinan terendah adalah provinsi DKI Jakarta dengan persentase 3,57 persen untuk rata-rata keseluruhan persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 9,82 persen. Dari data diatas terlihat masih ada 16 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan diatas rata-rata penduduk miskin Indonesia, hal tersebut merupakan permasalahan yang serius pemerintah, sehingga pemerintah harus mencari cara agar persentase penduduk miskin tahun 2019 dan seterusnya mengalami penurunan yang signifikan.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Lampung adalah masih tingginya angka kemiskinan Provinsi Lampung jika di bandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera. Tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga dalam jumlah tertinggi angka kemiskinan dari sepuluh Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pada tahun 2017 penduduk miskin di Lampung adalah 13,69 persen berada di urutan ketiga setelah Provinsi Bengkulu sebesar 16,89 persen dan Aceh 16,73 persen. Hal yang sama masih terjadi pada tahun berikutnya, pada tahun 2018 Provinsi Lampung menduduki peringkat ketiga dengan besar 13,14 persen. Walaupun nilai persentasenya berkurang namun Provinsi Lampung masih memiliki jumlah terbanyak Masyarakat miskin se-Sumatera. Terbukti pada angka terendah yang



di miliki oleh Bangka Belitung hanya 5,25 persen. Berikut ini merupakan persentase penduduk miskin menurut Provinsi di Sumatera tahun 2014-2018.<sup>13</sup>

**Tabel 1.2**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2014-2018**

No	Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kep.Riau	6,40	6,24	5,98	6,06	7,39
2	Keb. Bangka Belitung	4,97	5,40	5,22	5,20	5,25
3	Lampung	14,21	14,35	14,29	13,69	13,14
4	Bengkulu	17,09	17,88	17,32	16,46	15,43
5	Sumatera Selatan	13,62	14,24	13,54	13,19	12,80
6	Jambi	8,39	8,86	8,41	8,19	7,92
7	Riau	7,99	8,42	7,98	7,78	7,39
8	Sumatera Barat	6,89	7,31	7,09	6,87	6,65
9	Sumatera Utara	9,85	10,53	10,35	10,22	9,22
10	Aceh	16,98	17,08	16,73	16,89	15,97

*Sumber: Lampung dalam Angka 2018*

Dilihat dari keadaan geografis Provinsi Lampung yang merupakan gerbang lalu lintas kegiatan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang memiliki potensi sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional yang ditunjang dari Sumber Daya Alam yang di miliki oleh Provinsi Lampung. Seharusnya Provinsi Lampung potensi ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga pendapatan Provinsi Lampung sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang tinggi. Tetapi realita yang terjadi Provinsi Lampung masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi- provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera.

Dilihat dari kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini, Provinsi Lampung termasuk salah satu Provinsi yang mempunyai jumlah penduduk

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, *Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014-2018*

miskin kurang baik, yang dibuktikan dengan persentase kemiskinan setiap tahunnya terjadi kenaikan dan penurunan. Jumlah penduduk miskin yang paling banyak terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 20,22%. Kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal dan kesehatan. Ketidak setabilan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan pengangguran.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2009-2018.<sup>14</sup>

**Tabel 1.3**  
**Persentase Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2009-2018**

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2009	9,44
2	2010	9,55
3	2011	9,71
4	2012	9,83
5	2013	9,95
6	2014	10,07
7	2015	10,19
8	2016	10,30
9	2017	10,40
10	2018	10,50

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 10 tahun terakhir selama periode tahun 2009-2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi di tahun 2018 mencapai 10,50%.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, *Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2009-2018*

Selain itu, sumber daya bumi tidak bisa mengimbangi kebutuhan populasi yang terus bertambah, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia yang bersifat terbatas, hal ini mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena persaingan yang cukup ketat dalam memenuhi kebutuhan terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*Human Capital*) melalui pendidikan dalam rangka mendorong dan meningkatkan produktivitas dimana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, modal manusia dalam terminologi ekonomi digunakan untuk bidang pendidikan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas karena pendidikan memainkan kunci dalam kemajuan perekonomian di suatu negara.<sup>15</sup>

Pendidikan merupakan alat untuk mengadopsi teknologi moderen sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian, pendidikan juga merupakan komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat. Berikut ini tabel pendidikan penduduk menurut rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung tahun 2009-2018.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Eka Agustina, Mohd.Nur Syechalad, Abubakar Hamzah. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Aceh*, (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol.4 No.2, 2018), h.266

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, *Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2009-2018*

**Tabel 1.4**  
**Pendidikan Menurut Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung**  
**Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Rata-rata lama sekolah
1	2009	7,49%
2	2010	7,75%
3	2011	7,74%
4	2012	7,65%
5	2013	7,63%
6	2014	7,48%
7	2015	7,56%
8	2016	7,63%
9	2017	7,79%
10	2018	7,82%

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2018*

Perkembangan kondisi pendidikan menurut rata-rata lama sekolah secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2018 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari 10 tahun terakhir peningkatan terjadi pada tahun 2010 sebesar 7,75% yang mana ini meningkat pada tahun sebelumnya, namun ditahun setelahnya yaitu 2011-2016 mengalami penurunan sebesar 7,63%, dan mengalami kenaikan kembali ditahun 2017-2018 sebesar 7,82%.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran dimana salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan, Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai dimana semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.



Pengangguran yang merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan.<sup>17</sup> Pada saat ini lahan pekerjaan manusia sudah banyak tergantikan oleh mesin. Pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pada pertambahan tenaga kerja akan mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.<sup>18</sup>

Berikut adalah tabel jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2018.<sup>19</sup>

**Table 1.5**  
**Persentase tingkat pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Pengangguran
1	2009	6,62%
2	2010	5,57%
3	2011	5,78%
4	2012	5,18%
5	2013	5,69%
6	2014	4,79%
7	2015	5,14%
8	2016	4,62%
9	2017	4,33%
10	2018	4,06%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas tingkat pengangguran di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 10 tahun terakhir selama periode 2009-2018 mengalami fluktuatif. Jumlah pengangguran tertinggi terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 6,62%. Sedangkan jumlah pengangguran terendah terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,79%. Berdasarkan data tersebut tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

<sup>17</sup> A.A.N.B. Dwirandra, Ni Luh Nana Putri Ani, "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3 (2014), h. 482

<sup>18</sup> Durrotul Mahsunah, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur", h. 3.

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik, *Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2009-2018*

Salah satu masalah yang sangat serius untuk dilihat adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran tidak hanya dihadapi di dalam kehidupan konvensional, namun dalam islam juga dijelaskan mengenai proses dalam mencari rezeki yang telah Allah sediakan untuk umatnya yang mau bekerja keras bukan yang hanya berbangku tangan dan bermalas-malasan. Allah telah berjanji akan menanggung rezeki kita semua, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*<sup>20</sup>

Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT telah menciptakan “sistem” yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rizeki dan balasan atas apa yang telah dikerjakan. Upaya menurunkan pengangguran dan menurunkan kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi maka

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang, Thoah Putra, 1989), h.15

tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka kemiskinan juga rendah.<sup>21</sup>

Tetapi pada kenyataannya di Provinsi Lampung tidak sesuai dengan teori dalam melihat masalah yaitu misalnya didalam suatu kepala keluarga ada sebagian anggota keluarga yang bekerja dan sebagian anggota keluarganya lagi tidak bekerja (menganggur), tetapi sebagian anggota keluarga yang bekerja tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya dan memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan, maka baik individu atau keluarga tersebut dapat dikatakan bukan keluarga miskin.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2018”**

#### **D. Identifikasi Masalah**

Pemasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja akan menyebabkan rendahnya produktivitas penduduk.

---

<sup>21</sup> Sudono Sukirno, Makro Ekonomi Moderen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.12.

2. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan rendahnya keterampilan, wawasan, dan pengetahuan sehingga akan menimbulkan banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan.
3. Banyaknya jumlah pengangguran akan membuat pendapatan perkapita rendah sehingga akan menimbulkan efek kearah kemiskinan.

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam.

#### **E. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung secara simultan?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam?

#### **F. Tujuan dan manfaat penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung secara parsial.



- b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung secara simultan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## 2. Mnanfaa Penelitian

- 3. Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah:

### a. Secara praktis

- 1) Bagi penulis: hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulisan tentang bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran dan tingkat kemiskinan diprovinsi Lampung ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- 2) Bagi pihak lain : sebagai bahan kajian yang akan meneliti lebih lanjut permasalahan yang berhubungan dengan kemiskinan.

### b. Secara teoritik

- 1) Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, Khususnya Mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran dan tingkat kemiskinan lebih lanjut.
- 2) Akademisi: penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi Islam dan dapat

dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan, menambah pengetahuan, dan referensi lain yang berkaitan dengan pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran dan tingkat kemiskinan diprovinsi Lampung ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Kemiskinan

##### 1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan ,dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses ke pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, dimana sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluative, serta sebagian lainnya memahaminya dari sudut pandang ilmiah yang telah mapan.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdayaguna, signifikan, dan relevan, pengkajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan. Pengupayaan tersebut tentu

---

<sup>22</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta :Erlangga, 2016), h.282

sangat berarti sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan manusia.

Banyak pemahaman tentang kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli:

**a. Menurut Bank Dunia dan Chambers**

Memandang kemiskinan sebagai suatu kemelaratan dan ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam suatu standar hidup tertentu yang mengacu kepada konsep miskin relatif yang melakukan analisis perbandingan di negara-negara kaya maupun miskin. Sedangkan konsep absolut dari kemiskinan adanya wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak dan lain-lain.

**b. Menurut Todaro**

Kemiskinan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kondisi kesehatan sering kali buruk, banyak sekali diantara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, menganggur, dan prospek untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik sangat suram.<sup>23</sup>

**c. Menurut Direktorat Kependudukan**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang dihadapi oleh setiap Negara, baik Negara maju maupun Negara sedang berkembang. Masalah kemiskinan juga terkait dengan masalah kekurangan pangan, gizi, rendahnya tingkat pendidikan, rawannya

---

<sup>23</sup> Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas Jilid Satu*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.289

kriminalitas, tingginya tingkat pengangguran, dan masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan penduduk.<sup>24</sup>

**d. Menurut Bappenas**

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar itu antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam lingkungan hidup, rasa aman, ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.<sup>25</sup>

**e. Menurut Supriatna**

Kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

**f. Menurut Usman**

Kemiskinan adalah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta hidupnya serba kekurangan.

---

<sup>24</sup> Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bappenas, "Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KKS-I)", 2010.

<sup>25</sup> Pengertian Kemiskinan, <http://Bappenas.co.id>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.



Dari pandangan di atas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan-persoalan ekonomi saja. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak terfokus pada dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial.

## 2. Klasifikasi Kemiskinan

Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedang konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative.<sup>26</sup>

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

- a. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Dengan demikian ukuran kemiskinan relatif sangat bergantung pada distribusi pendapatan.
- b. Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi

---

<sup>26</sup> Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Ghalia, 2001), h.115

kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan minimumnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, atau struktural. Dengan kata lain seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk memenuhi tata nilai dalam masyarakat, sedangkan tata nilai itu sangat dinamis.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Azari menjelaskan pada dasarnya ada 3 macam yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, kemiskinan model ini muncul akibat sumber daya yang langka jumlahnya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Termasuk didalamnya kemiskinan yang dikarenakan jumlah penduduk yang melaju pesat ditengah sumber daya alam yang relatif tetap.
- b. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatannya yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat kelompok masyarakat tidak menguasai

---

<sup>27</sup> Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, “Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial,dan Lingkungan”, (Jakarta: LP3ES, 2004), h.52.

sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Dengan kata lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam.

- c. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi yang membebani ekonomi masyarakat seperti upacara perkawinan, kematian dan pesta adat lainnya. Termasuk juga dalam hal ini sikap mental penduduk yang lamban, malas, konsumtif, serta kurang berorientasi dimasa depan.

### 3. Garis Kemiskinan

- a. Garis Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa BPS memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan disertakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, ukuran inipun sudah menjadi kesepakatan dunia, dalam pertemuan di Roma tahun 2001, FAO (Food and Agriculture Organization) dan WHO (World Health Organization). Paket komoditi kebutuhan dasar yang diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.<sup>28</sup>

b. Garis Kemiskinan Menurut World Bank

Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh bank dunia, yaitu pertama US\$ 1,25 perkapita perhari yang diperkirakan ada sekitar 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut. Yang kedua, US\$ 2 perkapita perhari, yaitu lebih dari dua milyar penduduk yang hidup di bawah ukuran tersebut. US yang digunakan adalah US\$ SPP (Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar resmi (Exchange Rate). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

#### 4. Teori yang berhubungan dengan Kemiskinan

Seperti diketahui, terdapat banyak teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Adam Smith

Teori Adam Smith menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebahagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* menyatakan bahwa kebutuhan dasar bukan hanya hal-hal yang bersifat alamiah saja, tetapi juga hal-hal yang ditetapkan oleh norma umum tentang kelayakan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012), h.5-8.

<sup>29</sup> Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas Jilid Satu*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.250.

b. Teori Sosial Demokrat

Teori ini memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber kemasyarakatan. Teori sosial demokrat menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar bagi seluruh warga negara dan dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi manajemen permintaan gaya keynesian. Meskipun teori ini tidak setuju sepenuhnya terhadap pasar bebas, kaum sosial demokrat tidak anti sistem ekonomi kapitalis. Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk organisasi ekonomi yang paling efektif. Hanya saja sosial demokrat merasa perlu ada sistem negara yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pendukung sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki sumber kesejahteraan. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari pengaruh luar, melainkan bebas pula dalam menentukan pilihan.

c. Teori Marjinal

Teori ini berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi dikarenakan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu. Oscar Lewis adalah tokoh dari aliran teori marjinal. Konsepnya yang terkenal adalah Culture of Poverty. Menurut



Lewis, masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerah pada nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan banyak terjadi.

d. Teori Development

Teori Developmental (bercorak pembangunan) muncul dari teori-teori pembangunan terutama neo-liberal. Teori ini mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi dan masyarakat sebagai satu kesatuan.

Ada tiga asumsi dasar dari teori ini:

- 1) Negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut industrialisasi, modal, kemampuan manajerial, dan prasarana yang diperlukan untuk peningkatan ekonomi.
- 2) Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah ketimpangan.
- 3) Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.

Ketiga asumsi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi bukanlah persoalan budaya, sebagaimana anggapan teori marjinal melainkan adalah persoalan ekonomi dan pembangunan.

e. Teori Struktural

Teori ini didasari oleh pemikiran yang berasal dari teori ketergantungan yang diperkenalkan oleh *Andre Gunder Frank, Capitalism and the Underdevelopment in Latin America*, dan juga oleh Teothonio Dos Santos dan Samir.

Teori struktural berasumsi bahwa kemiskinan terjadi bukan karena persoalan budaya dan pembangunan ekonomi, melainkan politik-ekonomi Dunia.

Teori ketergantungan mengajukan tiga asumsi utama:

- 1) Dunia didominasi oleh suatu perekonomian tunggal sedemikian rupa sehingga semua negara di dunia diintegrasikan ke dalam lingkungan produksi kapitalisme yang menyebabkan keterbelakangan di negara miskin.
- 2) Negara-negara inti menarik surplus dari negara miskin melalui suatu mata rantai metropolis-satelit.
- 3) Sebagai akibatnya negara miskin menjadi semakin miskin dan negara kaya semakin kaya.

Dengan berdasar pada asumsi teori ketergantungan tersebut teori struktural mengajukan asumsi bahwa kemiskinan di dunia harus dilihat pada suatu konstelasi ekonomi internasional dan struktur politik global yang menerangkan bahwa ketergantungan yang menjadi penyebab negara terbelakang dan masyarakatnya menjadi miskin.

## 5. Aspek-aspek Kemiskinan

- a. Kemiskinan bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam
- b. Kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
- c. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif.<sup>30</sup>

## 6. Karakteristik-karakteristik Kemiskinan

- a. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti: tanah yang cukup, modal dan keterampilan yang tidak mencukupi. Sebagai akibat faktor produksi yang dimiliki sangat terbatas, maka kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- b. Mereka pada umumnya tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.
- c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah. Pendidikan ini sangat rendah karena waktu mereka lebih banyak tersita untuk mencari nafkah. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolahnya karena harus membantu orang tuanya mencari tambahan pendapatan.

---

<sup>30</sup> Muhammad Arifin, *Penanganan Kemiskinan Dalam Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan* (Medan: 2008), h.42.

- d. Banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Karena itu pekerjaan pertanian bersifat musiman, maka kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas yang berusaha apa saja. Akibatnya, dalam situasi penawaran kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga membuat mereka selalu hidup di bawah kemiskinan.<sup>31</sup>

## 7. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Ravi Kanbur dan Lyn Squire menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena dampak dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang pro-kemiskinan akan melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat, dan anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai *Skill* yang selanjutnya membuat produktivitasnya meningkat dan pendapatannya meningkat. Produktivitas yang meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Namun apabila pemerintah tidak prokemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak akan dipedulikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang mempunyai uang. Di beberapa negara, pemerintah membuat kebijakan tanpa

---

<sup>31</sup> Agus Suman, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 9: Sholeh Maimun, Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategi Penanggulangannya (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), h.95

peduli dengan suara dan kepentingan masyarakat miskin. Mereka hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri mereka sendiri.<sup>32</sup>

Kondisi kemiskinan dapat disebabkan sekurang-kurangnya empat penyebab:

Pertama, rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Kedua, rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu. Keempat, Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Purwiyanti Septina Franciari, *Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012).

<sup>33</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1996).



Keempat penyebab tersebut menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan. Karena pendidikan rendah, maka produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja.

Menurut Samuelson dan Nordhaus, penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan segera, maka penduduk dapat menggunakan modal dengan lebih efektif, menyerap teknologi baru dan belajar dari kesalahannya. Apabila ini ditunjang dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai, maka akan segera dapat mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan (termasuk

---

<sup>34</sup> Paul A Samuelson dan William D Nordhaus. *Pengantar Teori Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 1997).

keterampilan), tingkat kesehatan yang rendah dan terbatasnya fasilitas umum merupakan penyebab dari adanya kemiskinan.

## 8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut Zamzam, yaitu<sup>35</sup>:

### a. Pendidikan

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan suatu Negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

### b. Jumlah Penduduk

penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan apalagi dalam jumlah yang besar yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan demikian penduduk dianggap sebagai beban pembangunan. Penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

### c. Lapangan Kerja

Lapangan kerja adalah suatu tempat atau kantor yang masih kekurangan tenaga kerja. Usia angkatan kerja di Negara berkembang >15 tahun

---

<sup>35</sup> *Ibid* h.151

tetapi usia tersebut sebenarnya masih tergolong anak-anak. Idealnya seseorang dapat bekerja mencari penghasilan adalah usia di atas 17 tahun. Angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah karena sebagian besar lulusan tidak tamat SD & SMP.

d. Pemutusan Hubungan Kerja

Kenyataannya, para pekerja mempunyai preferensi serta kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Sementara, arus informasi tentang calon karyawan dan lowongan kerja tidak sempurna, serta mobilitas geografis pekerja tidak instan. Untuk semua alasan ini, mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu serta usaha dan ini cenderung mengurangi tingkat perolehan kerja. Tentu saja, karena pekerjaan yang berbeda membutuhkan keahlian yang berbeda dan memberikan upah yang juga berbeda, maka para penganggur mungkin tidak menerima pekerjaan yang pertama kali ditawarkan.

e. Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

## 9. Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan ke pada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah dan rasa sosialnya kepada sesame. Isu kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal. Dalam islam, definisi kebutuhan pokok ini bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Quraisy ayat 1-4.

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِيَّاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ  
هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

Artinya: “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (1); Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (2); Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah) (3); Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”<sup>36</sup>

Menunjuk pada ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan pokok meliputi:

- Dapat melaksanakan ibadah;
- Terpenuhinya kebutuhan sandang, dan papan; serta

<sup>36</sup> Al Rasyid., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya, Fajar Mulya, 1987), h.602

c. Hilangnya rasa takut

Dengan demikian, dimensi kebutuhan pokok ini bersifat multidimensi, di mana tidak hanya material namun juga spiritual, serta tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga ukhrawi. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan kemiskinan perlu adanya perhitungan dan standarisasi terhadap kebutuhan minimal ibadah dan spiritual dan harus dapat dikalkulasikan serta didefinisikan dengan baik, sehingga definisi kemiskinan pun dapat dikembangkan menjadi kemiskinan materiil dan kemiskinan spiritual.<sup>37</sup>

## **B. Jumlah Penduduk**

### **1. Pengertian Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.<sup>38</sup> Jumlah penduduk juga merupakan suatu masalah bagi ekonomi khususnya di Sumatera Bagian Selatan yang apabila tidak segera ditangani maka akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian suatu Negara. Kestabilan jumlah penduduk itu penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu dan terlepas dari warga negara atau bukan warga negara.

<sup>37</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2017.

<sup>38</sup> Yos Rusdiansyah, *Buku Saku Data dan Indikator sosial Provinsi Sumatera Selatan 2006-2017* (Palembang: BPS, 2018). h.3



Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang banyak tidak secara langsung menjadi modal pembangunan, bahkan dapat menjadi beban dan tanggungan penduduk lainnya.<sup>39</sup>

Penduduk memiliki peran penting dalam perekonomian. Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian karena berada pada sisi permintaan maupun sisi penawaran. Di sisi permintaan, penduduk adalah produsen jika ia pengusaha atau pedagang atau tenaga kerja jika ia hanya bekerja dalam konteks pembangunan. Pandangan terhadap penduduk terpecah menjadi dua, yaitu ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan dan ada pula yang menganggapnya sebagai pemacu pembangunan.<sup>40</sup> Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>41</sup>

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Kependudukan atau demografi adalah suatu hal yang mempelajari jumlah, persebaran, tetorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan seba-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalis

---

<sup>39</sup>Zurisdah Zahra, “*Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten*”, (Skripsi, IAIN “Sultan Maulan Hasanudin Banten,” Serang, 2016).

<sup>40</sup>Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia*, (Bandung: Erlangga, 2016), h.238

<sup>41</sup>*Ibid*, h.239

(fertilisasi), mortalitas, gerak tetorial (migrasi) dan mobalitas sosial (perubahan status).<sup>42</sup>

## 2. Indikator Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Kelahiran adalah proses pertumbuhan penduduk yang dilihat dari jumlah anak. Yaitu jumlah kelahiran tiap 1000 orang penduduk per tahun.
- b. Kematian adalah jumlah berkurangnya penduduk yang dilihat dari pertahun perseribu penduduk. Kematian merupakan penentu naik turunnya penduduk.
- c. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bertujuan menetap di suatu tempat atau wilayah ke tempat lain. Perpindahan penduduk membuat penduduk yang datang membuat jumlah penduduk bertambah.

## 3. Masalah Penduduk

Jumlah penduduk yang meningkat membawa dampak sebagai berikut:

- a. Jumlah angkatan kerja bertambah secara cepat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.
- b. Kemampuan menciptakan tambahan kesempatan kerja di suatu wilayah akan rendah.
- c. Angka pengangguran semakin meningkat menghasilkan pendapatan yang rendah, serta kesejahteraan rendah

---

<sup>42</sup>Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.2

#### 4. Jumlah Penduduk Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas ketimbang keturunan yang kualitasnya (jumlah) banyak. Kendati dalam satu riwayat, nabi mengatakan bahwa ia bangga dengan umat yang banyak (anamukasirun bikum al-anbiya'). Namun habis ini tetap harus dibaca dalam konteks kualitas. Umat yang jumlahnya banyak namun tidak berkualitas, alih-alih member rasa bangga, yang terjadi justru sebaliknya, merendahkan dan melemahkan apa yang kita rasakan adalah bukti, jumlah umat islam yang banyak di negeri yang tercinta ini, tidak membuat kita bangga sama sekali sebagai umat islam. Jumlah yang banyak tidak berkontribusi pada pembangunan peradaban yang damai dan sejahtera. Dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوهَا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*<sup>43</sup>

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapakan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010). h.77

kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya. Bagi pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena dikalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup.

Sunarti mengemukakan bahwa salah satu aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan indikator kesejahteraan dalam surat Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Al-Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ

خَوْفٍ ۚ

*Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah). Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*<sup>44</sup>

## C. Pendidikan

### 1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berprestasi.<sup>45</sup> Pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia, melalui pendidikan warga masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur hidupnya secara wajar.

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bagi setiap warganya, paling kurang untuk jenjang pendidikan dasar. Bahkan deklarasi HAM PBB menyebut pendidikan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh setiap negara.<sup>46</sup> Pendidikan dapat

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Fajar Mulya, 2009). h.602

<sup>45</sup>Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h.41

<sup>46</sup>Dicky Djatnika Utama, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol.6, No.1, Januari 2009, h. 5

dapat mengubah pola pikir seseorang, dimana melalui pendidikan seseorang memperoleh banyak pengetahuan, ilmu dan informasi yang terus berkembang. Melalui pendidikan orang dapat bersosialisasi secara baik dengan lingkungannya.

Secara teoritik dan empirik, pendidikan merupakan alat yang sangat fungsional dalam pembentukan manusia yang berkualitas, yang mampu mandiri dan memberikan dukungan bagi perkembangan masyarakat, dan berpengaruh dalam peningkatan mutu kehidupan dan mengangkat martabat bangsa. Melalui pendidikan diharapkan seseorang dapat meningkatkan kualitas fikir, kualitas moral, kualitas pengabdian. Pendidikan juga memiliki nilai kontribusi yang cukup tinggi bagi produktivitas nasional.<sup>47</sup>

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi:

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Jenjang pendidikan formal:

- 1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang

---

<sup>47</sup>Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h.165.



sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

2) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.

3) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.

- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peran sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan.<sup>48</sup>

Menurut Bocker dan Schultz pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan disuatu perekonomian. Logika ini juga yang mendorong strategi pengentasan kemiskinan yang besentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (*human capital*).

---

<sup>48</sup>Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi kedelapan. (Jakarta: Erlangga, 2004).

Romer dan Lucas menjelaskan bahwa modal manusia tidak hanya diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, namun juga mendorong tujuan pembangunan untuk meningkatkan *human freedom* secara umum. Selain itu, fokus perkembangan global saat ini yang dicatat dalam *millennium development goals* juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia dalam prioritas yang utama.<sup>49</sup>

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dapat lebih produktif dalam membangun bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.

Tobing mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Dian Satria, *Modal Manusia dan Globalisasi: Peran Subsidi Pendidikan*, (Jurnal Indef. Vol.2, 2008) h.7-8

<sup>50</sup> Elwin Tobing, *Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi*, 2005

Berhasilnya program pemberantasan buta aksara akan membuat warga percaya diri dan berdaya untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan pendidikan sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah.

## 2. Indikator Pendidikan

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti tingkat pendidikan tertinggi yang di tamatkan, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah.

### a. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang di Tamatkan

Tingkat Pendidikan Tertinggi atau disingkat TPT adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. TPT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.<sup>51</sup>

### b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki

---

<sup>51</sup>Ely Kusuma Retno, "pengaruh pendidikan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia", Jurnal pendidikan ekonomi, Vol 1, No 3, 2013, h.4

kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.<sup>52</sup>

### c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya.<sup>53</sup>

### 3. Pendidikan Menurut Pandangan Islam

Dalam islam, menuntut ilmu merupakan hal yang wajib bagi seluruh umat muslim, karena dengan adanya ilmu dan pengetahuan seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya ilmu seseorang dapat memberikan keputusan yang bijaksana dari segala permasalahan yang mereka alami. Dengan pendidikan seseorang dapat meninggikan derajatnya serta dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Al-Ghazali mengatakan tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Ghazali mengatakan:

*“dan sungguh engkau mengetahui bahwa hasil ilmu pengetahuan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta alam, menghubungkan diri*

<sup>52</sup>Edi Does,"pengaruh angka melek huruf dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di propinsi sumatera barat", (Journal of Economic and Economic Education, Vol.2 No.2). h.127-128.

<sup>53</sup>Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati,"analisis indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten bojonegoro",Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,Vol 18 No 2, Desember 2018, h.99.

dan berhampiran dengan ketinggian malaikat, demikian itu di akhirat. Adapaun di dunia adalah kemuliaan, kebesaran, pengaruh pemerintahan bagi pemimpin negara dan penghormatan menurut kebiasaannya".<sup>54</sup>

Al-Ghazali sering dengan kepribadian, ia tidak memperhatikan kehidupan dunia semata-mata atau kehidupan akhirat semata, tetapi beliau menganjurkan untuk berusaha dan bekerja bagi keduanya, tanpa meremehkan salah satunya. Jadi, ruang lingkup pendidikan yang diharapkan bagi masyarakat muslim khususnya, menurut Al-Ghazali tidak sempit dan tidak terbatas bagi kehidupan dunia atau akhirat semata, akan tetapi harus mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Mujadalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَلَفْسَحُوْا يَفْسَحِ  
 اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوتُوْا  
 الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۭ وَاللّٰهُۤ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌۭ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>55</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'aala akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman dengan beberapa derajat sesuai yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu dan iman di surga. Oleh karena itu, dia akan membalas orang yang beramal dengan amalnya, jika baik maka akan dibalas

<sup>54</sup>Drs. Zainuddin,dkk, Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.46

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h.546



dengan kebaikan, dan jika buruk, maka akan dibalas dengan keburukan.<sup>56</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting karena dengan adanya ilmu seseorang dapat membedakan yang baik dan buruk serta dapat menunjang kehidupan kearah yang lebih baik.

#### **D. Pengangguran**

##### **1. Pengertian Pengangguran dan Hukum Pengangguran**

Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SDtamat SMU).<sup>57</sup>

Dalam standar yang telah ditetapkan secara internasional, yang dimaksud pengangguran adalah seseorang yang sudah di golangkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan dalam tingkat upah tetentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Berdasarkan definisi ini, seperti yang telah di katakana, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, dan anak-anak orang kaya yang sudah dewasa tetapi tidak bekerja, tidak di golongan sebagai pengangguran, karena mereka tidak secara aktif mencari kerja.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Tafsir Al-Quran Al-Karim, [www.tafsir.web.id](http://www.tafsir.web.id) di Undah Pada Tanggal 20 Juli 2020.

<sup>57</sup> Iskandar Putong, *Ekonomic Pengantar Mikro dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 426-427.

<sup>58</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dan Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 472

Pengangguran yang terjadi disebabkan adanya ketidakseimbangan di dalam pasar kerja. Pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena bagaimana baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Akan tetapi mazhab klasik dengan salah satu teorinya yang terkenal sebagai Hukum Say dari *Jean Baptise Say* yang mengatakan bahwa *supply creates its own demand* atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi maka pengangguran tidak akan ada, dan bilapun ada tidak akan berlangsung lama, karena akan pulih kembali. Cara kerjanya sederhana, bahwa bila produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu maka akan segera habis dikonsumsi masyarakat. Pada saat yang sama misalkan terdapat para pencari kerja, oleh karena itu produsen akan lebih baik menghasilkan barang dalam jumlah banyak untuk memperbesar keuntungan tanpa takut resiko gagal dalam penjualan maka semua pencari kerja itu akan terserap untuk mengisi lowongan baru yang disediakan oleh produsen atau perusahaan, dan ini berlangsung terus.<sup>59</sup>

Semakin banyaknya pengangguran, diharapkan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jumlah pengangguran. Hal ini dikarenakan setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2). Kemudian dalam Pasal 9

---

<sup>59</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*,... h. 426-427

Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Selain itu, dalam Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan taraf kehidupan yang layak bagi setiap warga Indonesia, pemerintah wajib menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh warga Indonesia. Pernyataan ini sesuai dengan kewajiban pemerintah atas pemenuhan hak-hak warga Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Penciptaan lapangan kerja ini tak hanya melibatkan kepentingan tenaga kerja, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah dengan cara melakukan perluasan kesempatan kerja ataupun penempatan kerja untuk para pencari kerja. Penjelasan mengenai pengertian dari penempatan kerja sesuai dengan Permenakertrans Nomor 07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan

kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Berkaitan dengan proses pelayanan kepada pencari kerja tersebut, maka pemerintah bekerja sama dengan para pemberi kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Atau pemerintah melakukan perluasan kesempatan kerja di seluruh penjuru Indonesia, untuk memberikan pekerjaan kepada para pencari kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Kemudian yang melaksanakan penempatan kerja ini adalah pelaksana penempatan kerja yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Permenakertrans Nomor 07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja, yaitu meliputi instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan lembaga swasta berbadan hukum.

## **2. Teori-Teori Pengangguran**

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori pengangguran di Indonesia :

### **a. Teori Klasik**

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> T Ghilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.217.

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil.

**b. Teori Keynes**

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerjameningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.<sup>61</sup>

**3. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut perspektif Islam, kerja (‘amal) menyangkut segala aktifitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah yang

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 219

dimaksudkan untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara Syar'i. Ketika seseorang tidak mau mempergunakan potensinya maka itulah pengangguran yang amat membahayakan diri dan masyarakat. Secara moral islam orang yang demikian adalah menganggur yang memikul dosa. Sedangkan yang terus memfungsikan potensinya baik modal, tenaga, maupun pikirannya tidak termasuk kategori menganggur yang menyalahi ajaran islam.<sup>62</sup> Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja. Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Al-Jasiyah: 12-13.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

*Artinya: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Bagi manusia telah disediakan kekayaan alam dilangit dan dibumi, maka manusia dianjurkan untuk mengolahnya sebagai rasa syukur dan untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Manusia yang bersedia

<sup>62</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah...*, h.138.



mengelola sumber daya alam yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. Maka dia akan mampu memenuhi kebutuhankebutuhannya dan mampu memakmurkan bumi. Tugas pengolahan sumber daya alam ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena kekayaan bumi yang luar biasa ini perlu dieksplorasi agar kekayaan yang tersembunyi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemudahan kehidupan manusia dan tercapainya peningkatan kesejahteraan manusia.

Penyebab pengangguran dalam islam bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor individu dan faktor sistem sosial dan ekonomi.<sup>63</sup>

*Pertama*, faktor individu terdiri dari kemalasan, cacat/udzur dan rendahnya pendidikan dan keterampilan. *Kedua*, faktor sistem sosial dan ekonomi. Faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia diantaranya, ketimpangan anatarap penawaran tenaga kerja dan kebutuhan, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, pengembangan sector ekonomi non-real, banyak tenaga kerja wanita.

Sikap kerja keras amat penting dimiliki oleh setiap muslimin dan muslimat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mengabdikan diri Allah swt. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu tugas yang mulia, yang akan membawa diri seseorang pada posisi terhormat, bernilai, baik di mata Allah SWT maupun di mata kaumnya. Oleh sebab itulah, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan Ibadah. Orang yang bekerja akan mendapat pahala

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h.138

sebagaimana orang beribadah. Orang-orang yang pasif dan malas bekerja, sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur.

Seperti dalam Hadis Rasulullah Saw yang artinya:

*“Dari Rifa’ah bin Rafi’ berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik?. Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan.” (HR. Al-Bazzar dan ditashihkan Hakim).*

#### 4. Jenis-Jenis Pengangguran

Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu sebagai berikut:

##### a. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya adalah sebagai berikut:

##### 1) Pengangguran Normal atau Friksional

Yaitu para penganggur yang tidak ada pekerjaan yang bukan berarti karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja. Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai

pengangguran. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.<sup>64</sup>

## 2) Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, dinegara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaanya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

## 3) Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran

---

<sup>64</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*,...133

sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.<sup>65</sup>

#### 4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan dipabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.<sup>66</sup>

#### b. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya adalah sebagai berikut:

##### 1) Pengangguran Terbuka

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 134

<sup>66</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*,..., h.328-329.

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industry.

## 2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Dibanyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran

yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

### 3) Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat disektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para petani tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

### 4) Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai



setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.<sup>67</sup>

## 5. Sebab-sebab Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

- a. besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja.  
Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
- b. Struktur lapangan kerja tidak seimbang
- c. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
- d. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia
- e. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.  
Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 330.

sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.<sup>68</sup>

## 6. Dampak Negatif Pengangguran

Beberapa dampak negatif dari pengangguran dibedakan menjadi dua aspek, dimana dua aspek tersebut yaitu<sup>69</sup>

### a. Akibat buruk keatas kegiatan ekonomi

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai dampak negatif dari masalah pengangguran :

1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional rill (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah dari pada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai masyarakatpun akan lebih rendah.

2) Pengangguran meyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.

Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk

<sup>68</sup> Muhdar HM, Potret *Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi* , Jurnal Al- Buhuts, Vol. 11 No. 1 Juni 2015 ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X, h. 46

<sup>69</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Klasik...*, h.514.

kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunanpun akan terus menurun.

- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan keuntungan perusahaan rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah:

- 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
- 2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
- 3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya pendapatan masyarakat

mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu dia dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologi yang buruk atas diri penganggur dan keluarganya.

Apabila keadaan pengangguran disuatu negara buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan propek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Nyatalah bahwa masalah pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat, dan oleh sebab itu secara terus menerus usaha-usaha harus dilakukan untuk mengatasinya

## **7. Solusi Mengatasi Pengangguran**

Masalah pengangguran di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal dan dapat menghambat

pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan bangsa Indonesia ke depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarganya. Olehnya itu, masalah ketenagakerjaan dan pengangguran harus diminimalisasi agar tidak berdampak terhadap kemiskinan. Dalam mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran, dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mampu menurunkan angka pengangguran dan mengatasi masalah ketenagakerjaan, diantaranya: Pertama, dalam pembangunan nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter diarahkan pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Guna menumbuhkan kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung program-program yang terkait dengan kebijakan fiskal dan pemberdayaan UKM meliputi: Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE). Kedua, Sinergisitas kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang

merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.<sup>70</sup>

#### **E. Penelitian terdahulu**

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

Eka Agus Tina, Moh Nur Syechalad, Abu Bakar Hamzah pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan sebesar 76,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dari uji simultan (uji F) dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Variabel jumlah penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai koefisien sebesar -1,006. Variabel tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai koefisien sebesar 0,557. Variabel tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan

---

<sup>70</sup> Muhdar HM, *Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan kemiskinan di Indonesia.....*, h. 61



signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai koefisien sebesar 2,905.<sup>71</sup>

Saharuddin Didu, Ferri Fauzi pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak Dalam Periode 2003 Sampai 2012”. Hasil penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda OLS. Berdasarkan hasil analisis Variabel jumlah penduduk (JP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak, Variabel pendidikan (PEN) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak, dan Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak.<sup>72</sup>

Umaruddin Usman dan Diramita pada tahun 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau”. Hasil penelitian ini adalah secara parsial dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan dan negative terhadap kemiskinan di Provinsi kepulauan Riau, pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di kepulauan Riau, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di kepulauan Riau. Besarnya pengaruh jumlah penduduk,

---

<sup>71</sup>Eka Agus Tina, Moh Nur Syechalad, Abu Bakar Hamzah. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh*. (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam). Vol.4 No.2 september 2018.

<sup>72</sup>Saharuddin Didu, Ferri Fauzi. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak Dalam Periode 2003 Sampai 2012*. (Jurnal Ekonomi-QU), Vol.6 No.1 April 2016. h. 100-114.

pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kepulauan Riau sebesar 0,9511 atau 95%.<sup>73</sup>

I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka pada tahun 2015 melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapital, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali”. Hasil penelitian ini adalah Variabel pendidikan, PDRB perkapital, dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap penduduk miskin Provinsi Bali 2007-2013, sedangkan variabel pendidikan dan PDRB perkapital secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali serta variabel berpengaruh paling dominan terhadap jumlah penduduk miskin Bali adalah PDRB perkapita.<sup>74</sup>

Dwi Puspita Hambarsari dan Kunto Inggit pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014”. Hasil penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pertumbuhan penduduk dan variabel inflasi

---

<sup>73</sup>Umaruddin Usman dan Diramita. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau*. (Jurnal Ekonomi Regional Unimal), Vol.1 No.2 Agustus 2018.

<sup>74</sup>I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka. *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapital, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*. (E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana), Vol.4 No.5 Mei 2015.

tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan inflasi berpengaruh secara silmutan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Peneliti ini menggunakan variabel X1 (Jumlah Penduduk), X2 (Pendidikan), X3 (Pengangguran), dan variabel Y (Tingkat Kemiskinan), penelitian ini mengambil variabel Y (Kemiskinan). Penelitian ini diliat dari sudut pandang Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadis.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh	Hasil penelian ini untuk pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan menunjukan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perbedaannya dalam pembahasan peneliti sebelumnya tentang pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan saja sedangkan peneliti berfokus pada Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan diliat dari sudut pandang Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist.</li> <li>➤ Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian. Yang mana peneliti melaksanakan penelitian di Provinsi Lampung.</li> </ul>
2.	Pengaruh Jumlah Penduduk,	Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda OLS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perbedaannya dalam penelitian sebelumnya menggunakan data penelitian 10 tahun terakhir</li> </ul>

	pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak Dalam Priode 2003 Sampai 2012.	Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel pendidikan, dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak	sedangkan peneliti 5 tahun terakhir. ➤ Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian. Yang mana peneliti melaksanakan penelitian di Provinsi Lampung.
3.	Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Populasi memiliki efek signifikan dan negatif pada kemiskinan, sementara pengangguran tidak berdampak pada kemiskinan dan pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau	➤ Perbedaannya dengan penelitian terdahulu pada Pengaruh Jumlah Penduduk Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan, yang mana peneliti terfokus pada Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. ➤ Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian. Yang mana peneliti melaksanakan penelitian di Provinsi Lampung.
4.	Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapita, dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali	Hasil analisis ditemukan bahwa pendidikan, PDRB perkapita, dan tingkat pengangguran secara serempak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.	➤ Perbedaannya dalam penelitian sebelumnya menggunakan data penelitian 10 tahun terakhir sedangkan peneliti 5 tahun terakhir. ➤ Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian. Yang mana peneliti melaksanakan penelitian di Provinsi Lampung.
5.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014	Penelitian ini dilakukan dengan perhitungan analisis regresi menggunakan bantuan program spss 21 dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan.	➤ Perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan deret waktu 10 tahun sedangkan peneliti berfokus pada deret waktu 5 tahun ➤ Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian. Yang mana peneliti melaksanakan penelitian di Provinsi Lampung.

(sumber diolah sendiri oleh peneliti)

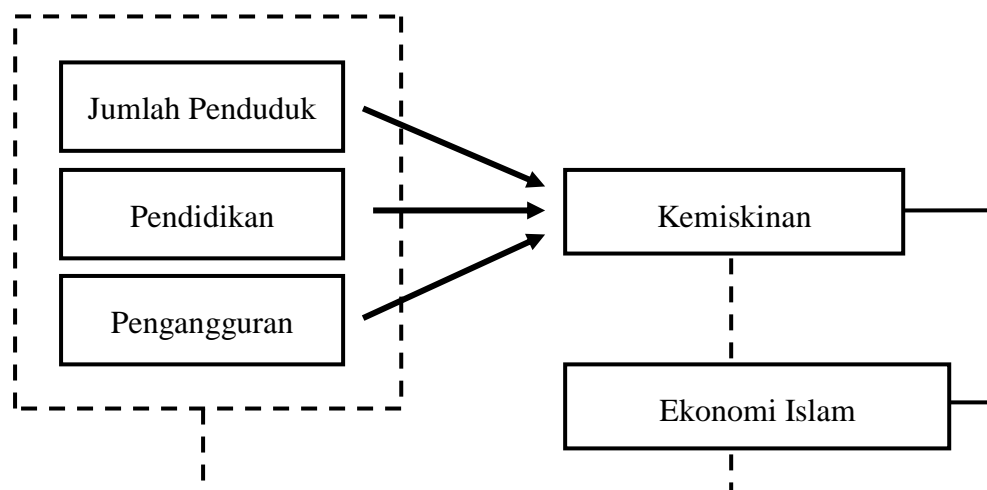
## F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu (Jumlah Penduduk), (Pendidikan) dan (Pengangguran) yang memengaruhi satu variabel terikat (Kemiskinan). Jumlah Penduduk Pendidikan dan pengangguran pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan secara komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan diantaranya yaitu jumlah penduduk pendidikan dan pengangguran.

Untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran kerangka teori dalam pemikiran ini yang akan dikaji dalam perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



**Keterangan :**

———— = Berpengaruh secara parsial

- - - - - = Berpengaruh secara simultan

**G. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori maka hipotesisnya adalah :

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2014-2018.

Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Lampung akan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jadi jumlah penduduk memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia Dwi Rahmawati menemukan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di DIY pada tahun 2006-2013. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad dan Abubakar Hamzah menemukan bahwa jumlah penduduk secara parsial dan simultan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.



Melihat dari penelitian diatas maka hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 = jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

H1 = Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

2. Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2014-2018.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Jadi pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian terdshulu yang dilakukan oleh Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi menemukan bahwa secara empiris pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan maka kemiskinan akan menurun. Melihat dari penelitian di atas maka hipotesis kedua yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  = Pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung

$H_2$  = pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

3. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2014-2018.

Semakin tinggi angka pengangguran maka akan membuat produktifitas masyarakatnya rendah hal ini dikarenakan ketika seseorang yang harusnya sudah masuk usia produktif namun tidak dapat mendapat pekerjaan akan menjadi beban bagi dirinya dan lingkungan. Akibatnya produktifitas yang harusnya meningkat bagi dirinya akan menurun kemudian pengaruhnya terhadap naniksmiek jika kondisi masyarakatnya mengalami produktifitas yang rendah maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya sehingga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu wilayah tersebut. Jadi pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ita Agustina, Made Kembar Sri Budhi, I G.A.P. Wirarti dan Ida Bagus Darsanan menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Sedangkan menurut Umaruddin Usman dan Diramita menemukan bahwa pengangguran secara parsial dan silmutan tidak berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Provinsi Lampung. melihat

dari penelitian di atas maka hipotesis ketiga yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 = Jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung

H3 = Jumlah pengangguran tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agung Abdul Rasul, *Praktikum Statistika Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).
- Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Al Rasyid., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya, Fajar Mulya, 1987).
- Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta :Erlangga, 2016).
- Badan Pusat Statistik, *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2012*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012).
- Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang, Thoha Putra, 1989).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Fajar Mulya, 2009).
- Drs. Zainuddin,dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1996).
- Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Iskandar Putong, *Ekonomic Pengantar Mikro dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).

Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, “*Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial, dan Lingkungan*”, (Jakarta: LP3ES, 2004).

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan*. (Jakarta: Erlangga, 2004).

Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas Jilid Satu*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Muhammad Arifin, *Penanganan Kemiskinan Dalam Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan* (Medan: 2008).

Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005).

M.Djumransjah, *Filsafat Pendidikan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004).

Paul A Samuelson dan William D Nordhaus. *Pengantar Teori Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 1997).

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dan Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Solimun, Adji Ahmad, Dkk, *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Pemasaran Struktural (SEM) Pendekatan WarPLS*, (Malang: UB Press, 2017).

Sudono Sukino, *Makro Ekonomi Moderen*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2000).

Suerjono suekarto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006).

Sugiono, *Penelitian Administrative*, (Bandung : Alfabate, 2001).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: IKAPI, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

T Ghilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Ghalia, 2001).

Usman Husaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

Yos Rusdiansyah, *Buku Saku Data dan Indikator sosial Provinsi Sumatera Selatan 2006-2017* (Palembang: BPS, 2018).

**Jurnal :**

A..A.N.B. Dwirandra, Ni Luh Nana Putri Ani, "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3 (2014)

Agus Suman, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 9: Sholeh Maimun, Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategi Penanggulangannya (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).

Dicky Djatnika Utama, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol.6, No.1, Januari 2009.

Edi Dore, "pengaruh angka melek huruf dan angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di propinsi sumatera barat", (Journal of Economic and Economic Education, Vol.2 No.2).

Eka Agustina, Mohd.Nur Syechalad, Abubakar Hamzah. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Aceh*, (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol.4 No.2, 2018).

Ely Kusuma Retno, "pengaruh pendidikan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia", Jurnal pendidikan ekonomi, Vol 1, No 3, 2013.



Endang Siswati dan Diah Tri Hermawati,"*analisis indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten bojonegoro*",Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,Vol 18 No 2, Desember 2018.

Erutan Agus Panu Anton, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmi Politik, Vol. 10 No. 3 Maret 2007

Muhdar HM, Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan kemiskinand di Indonesia: Masalah dan Solusi , Jurnal Al-Buhuts, Vol. 11 No. 1 Juni 2015 ISSN 1907-0977 E ISSN 2442-823X.

Naerul Edwin Kiky Aprianto,"*Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam*", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2017.

Purwiyanti Septina Franciari, *Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012).

Umarudin Usman dan Diramita,"*Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Ekonomi Regional Unimal . Vol. 01 No. 02 Agustus2018.

Zurisdah Zahra, "*Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten*", (Skripsi, IAIN "Sultan Maulan Hasanudin Banten," Serang,2016).

#### Online :

Sejarah Lampung (On-Line) Tersedia di  
<http://lampungprov.go.id/page/detail/visi-misi-provinsi-lampung.html>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 09.30 WIB

Tafsir Al-Quran Al-Karim, [www.tafsir.web.id](http://www.tafsir.web.id) di Undah Pada Tanggal 20 Juli 2020